

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU (Studi KASUS TENTANG EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN)

Nurhalimah¹⁾; Bambang Sutikno²⁾ ; Sudriyanti Putri³⁾

Program of Public Administration

Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾ nurhalimah@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 November
2025]

Revised [25 Desember 2025]

Accepted [31 Januari 2026]

KEYWORDS

Implementasi, Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT),
Efektivitas, Tantangan,
Kecamatan Ratu Samban

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Program BPNT merupakan salah satu bentuk transformasi kebijakan sosial pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, dan transparansi penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui mekanisme non-tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Sosial, aparatur kecamatan, pendamping sosial, serta penerima manfaat BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BPNT di Kecamatan Ratu Samban secara umum berjalan cukup efektif. Program ini telah mampu meningkatkan kemudahan akses bantuan, ketepatan sasaran, serta mendorong penggunaan sistem digitalisasi bantuan sosial

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Ratu Samban Subdistrict, Bengkulu City, as well as to identify its effectiveness and the challenges encountered during implementation. The BPNT program represents a transformation of the government's social policy aimed at improving target accuracy, efficiency, and transparency in the distribution of food assistance to beneficiary families (KPM) through a non-cash mechanism. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation with informants consisting of officials from the Social Service Office, subdistrict administrators, social facilitators, and BPNT beneficiaries. The findings indicate that the implementation of the BPNT program in Ratu Samban Subdistrict has generally been effective. The program has enhanced the accessibility of assistance, improved targeting accuracy, and encouraged the use of digital systems in social aid distribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu isu paling penting yang dihadapi oleh banyak negara. Ada berbagai definisi tentang kemiskinan, mulai dari ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, kurangnya akses terhadap kesempatan ekonomi, hingga aspek sosial dan moral yang lebih dalam.

Dalam pengertian yang lebih sederhana, kemiskinan berarti keadaan kekurangan sumber daya seperti uang dan barang yang diperlukan untuk bertahan hidup. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang rumit dengan berbagai aspek. Menurut Kurniawan, kemiskinan terjadi saat pendapatan sekelompok orang berada di bawah tingkat minimum yang dikenal sebagai garis kemiskinan.

Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan menunjukkan adanya masalah sosial yang serius. Hal ini sering kali diperparah oleh keterbatasan akses ke peluang kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, kurangnya demokrasi dan ketidaksetaraan kekuasaan juga menghalangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. Akibatnya, banyak orang mengalami kesulitan dalam mendapatkan lahan, teknologi, pendidikan, kredit, dan akses ke pasar. Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan program bantuan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program strategis. Di antaranya adalah Undang-Undang yang mengatur penanganan warga miskin, Peraturan Pemerintah yang mengarahkan pelaksanaan kesejahteraan sosial, serta Peraturan Presiden yang fokus pada percepatan upaya pengentasan kemiskinan.

Peran pemerintah dalam menangani kemiskinan memiliki pengaruh yang besar, karena kebijakan dan peraturan yang diberlakukan menjadi landasan untuk Pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai pedoman.

Penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, adalah langkah krusial dalam upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini menggantikan bantuan pangan tunai dengan sistem kartu elektronik, memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membeli bahan pangan pokok di agen-agen yang telah ditunjuk. Tujuannya adalah untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak, meningkatkan gizi masyarakat, dan menstimulasi ekonomi lokal. Namun, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih menjadi topik yang menarik untuk ditelaah (Sihombing, 2022).

Tantangan lain yang signifikan adalah sosialisasi program. Tidak semua KPM memahami mekanisme penggunaan kartu BPNT, jenis bahan pangan yang boleh dibeli, atau bagaimana melaporkan jika terjadi masalah. Kurangnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menyebabkan KPM kebingungan dan berpotensi merugikan mereka. Edukasi yang kurang ini juga membuka celah untuk spekulasi atau intervensi pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengurangi nilai manfaat yang seharusnya diterima KPM (Robinson et al., 2023).

Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah program bantuan pangan non tunai (BPNT). BPNT adalah sebuah program dari pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat keuangan yang mencakup semua lapisan masyarakat serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam distribusi bantuan sosial. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017. Sedangkan PERMENSOS RI Nomor 20 Tahun 2019 merupakan revisi dari Permensos RI Nomor 11 Tahun 2018 mengenai distribusi bantuan pangan tidak langsung. Namun implementasi bantuan sosial masih menghadapi tantangan, seperti ketidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan. Banyak individu yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan terabaikan (Suharto, 2017). Kesalahan dalam pendataan sosial menjadi faktor utama dalam distribusi yang kurang optimal.

Kurangnya keterbukaan dalam pendistribusian bantuan juga merupakan masalah yang harus diselesaikan. Beberapa contoh menunjukkan adanya tindakan penyalahgunaan dan korupsi dalam penyaluran bantuan, yang berdampak negatif pada keberhasilan program dalam mengatasi kemiskinan (Salsabila et al., 2024). Dengan demikian, pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi dalam proses distribusi bantuan sangat penting untuk memastikan adanya transparansi dan tanggung jawab. Program bantuan pangan non tunai ini diberikan pemerintah tiap bulannya sebesar Rp.200.000/KPM. Penerima berhak membelanjakan bantuannya di warung elektronik seperti : beras, ayam, daging, sayur, buah dan kacang-kacangan.

Kota Bengkulu, terutama kecamatan Ratu Samban, adalah tempat dilaksanakannya program bantuan pangan yang tidak berbentuk uang tunai. Kota ini memiliki 9 kecamatan dan 9 kelurahan. Salah satu kelurahan di kecamatan Ratu Samban yang menjadi lokasi penyaluran BPNT adalah Kelurahan Penurunan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi BPNT di Kecamatan Ratu Samban menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas program dalam mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan KPM. Dengan memahami dinamika di lapangan, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi kebijakan yang

lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan program BPNT di masa depan (Salsabila & Alhadi, 2022)

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi kebijakan Adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh implementor berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu sebagaimana yang telah tercantum dalam prosedur peraturan yang berlaku, dimana kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pihak swasta dan masyarakat.

Keberhasilan suatu program merupakan tujuan implementasi, sebagaimana dinyatakan dalam definisi implementasi Grindle yang berbunyi: "Implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diperiksa pada tingkat program tertentu. Proses implementasi hanya akan dimulai ketika tujuan dan tujuan telah ditetapkan, program kegiatan telah direncanakan, dan dana tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran".

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994:139), didefinisikan sebagai "keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan". Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata- nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992:5), menyatakan bahwa "implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program".

Pengertian Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini bagian dari perencanaan. Program dikatakan baik ketika program didasarkan atas model teoritis yang jelas. Sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi.

Charles (2017) mendefinisikan program adalah alternatif digunakan dalam mencapai tujuan, berbagai karakteristik yang ikut membantu seseorang dalam mengidentifikasi suatu kegiatan yang dinilai apakah termasuk dalam program atau sebaliknya adalah:

1. Program memerlukan staf untuk melaksanakan kegiatan.
2. Program biasanya mempunyai biaya sendiri dan dapat diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program mempunyai ciri tersendiri yang dapat diakui oleh pihak apabila berhasil.

Menurutnya, program merupakan rangkaian yang memuat instruksi berupa bahasa yang dapat dibaca oleh komputer. Penyusunan program tersebut dilakukan secara sistematis dan logis (Sugiyono).

Menurut Abdul Kadir (2012:2) dalam bukunya yang berjudul Algoritma dan Pemrograman Menggunakan Java, "Program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu."

Sedangkan Menurut Sutarman (2009:3), "Program adalah barisan perintah/intruksi yang disusun sehingga dapat dipahami oleh komputer dan kemudian dijalankan sebagai barisan perhitungan numerik, di mana barisan perintah tersebut berhingga, berakhir, dan menghasilkan keluaran."

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa program adalah serangkaian instruksi yang dioperasikan untuk melaksanakan suatu tugas di dalam komputer.

Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga rumah tangga rawan ekonomi, untuk setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik dengan perantara kartu, yang akan mendapatkan tranferan dana yang digunakan langsung untuk membeli dan ditukarkan dengan bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni usaha mikro, usaha kecil, koperasi, pasar tradisional, toko kelontong, e-warung KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen lakaun pandai, agen layanan keuangan digital yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya, yang oleh

masyarakat biasa disebut dengan e-warung, karena menggunakan mekanisme elektronik dalam transaksinya.

Untuk setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan memiliki Kartu keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan pemerintah melalui Bank Penyalur yang telah bekerja sama dengan program, fungsi dari kartu keluarga sejahtera (KKS) berfungsi sebagai alat untuk menukar bantuan.

Sistematis alur dalam program BPNT ini yakni, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdapat di DT-PPFM dan merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015, akan mendapatkan kartu KKS, yang kartu tersebut akan terisi saldo sebesar Rp 200.000,- untuk dibelanjakan atau ditukarkan dengan bahan-bahan pangan di e-warung (outlet) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dasar Hukum Kebijakan BPNT 1) UU No. 25/Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) UU No. 13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3) UU No. 18/Tahun 2012 tentang Pangan 4) UU No.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5) Perpres No.82/Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 6) Perpres No. 63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT) 7) Arah Presiden 26 Maret 2017, 16 April 2017, dan 19 Juli 2017.

Adapun Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemanfaatan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
3. Meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (suistanable Development Goals/SDGS).

Manfaat dari BPNT antara lain:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai

Besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk setiap bulannya sebesar Rp 200.000,- yang ditransfer setiap bulan oleh Bank HIMBARA melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, melainkan dapat digunakan untuk membeli atau ditukar dengan bahan pangan yang telah disediakan oleh agen yang telah berkerja sama dengan program BPNT, bahan pangan tersebut seperti beras, gula, telur, minyak ataupun tepung. Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program BPNT ini dipilih berdasarkan tujuan peningkatan nilai gizi dan nutrisi KPM, maka untuk pemilihan komoditi bahan pangan ini dapat berubah dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan KPM.

Pengertian Efektivitas

Kamus ilmiah populer memberikan pengertian efektivitas sebagai konsistensi yang digunakan untuk mendukung suatu tujuan. Dimana efektivitas merupakan unsur fundamental guna mencapai sasaran maupun tujuan yang sudah ditetapkan dalam setiap lembaga. Dikatakan efektif jika sesuatu yang direncanakan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut sama dengan pandangan Ili (1994), yang mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menilai tercapainya sebuah tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan (Ili & Pustaka, n.d.) mendefinisikan efektivitas yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk sebuah lembaga atau sejenisnya, dimana dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat ketegangan dan penekanan. Hidayat juga menjelaskan bahwa efektivitas adalah indikator yang dipakai mengetahui apakah tujuan tersebut tercapai. Karena semakin tinggi persentase tujuan tercapai, maka tingkat efektivitasnya pun akan semakin tinggi.

Efektivitas berasal dari kata efektivitas yang berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, manjur dan mujarab, ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya). Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun

sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani (2006:16) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efisiensi mengadung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Widodo D.S dalam Sunarto (2007:27) mengemukakan efektivitas berarti dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan dan dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut adalah ditentukan terlebih dahulu dan juga efektivitas berarti dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa "efektivitas adalah suatu yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitas".

Merujuk pada beberapa pendapat tersebut, olehnya itu di tarik kesimpulan bahwa efektivitas ialah sebuah keadaan yang menunjukkan seberapa layak rencana tersebut.

Ukuran efektivitas dipakai untuk mengukur tingkat efektivitas itu sendiri. Dimana untuk mengukurnya adalah dengan membandingkan sesuatu yang sudah direncanakan terhadap hasil yang didapatkan. Untuk mengukur efektivitas digunakan indikator 5T, yakni : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat penggunaan.

Efektivitas Program

Efektivitas Program yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan sejauh mana sebuah program atau kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berbagai tindakan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan pengukuran suatu kegiatan efektivitas program maupun pelaksanaan suatu pembangunan suatu kegiatan efektivitas program maupun pelaksanaan suatu pembangunan tidaklah mudah dan sederhana. Menurut Dunn (2003:429) efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif dapat mencapai target/tujuan dari adanya tindakan. Efektivitas pelaksanaan program lazimnya berkaitan dengan upaya pengukuran ataupun penilaian terhadap sejauh mana tercapainya tujuan. Sedangkan menurut Julia (2010:26) efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana program yang telah ditetapkan.

Maka dari itu, efektivitas program penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat dilihat dari bagaimanakah suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah program dapat dikatakan efektif apabila program yang telah diimplementasikan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas program

Menurut Hasibuan mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program antara lain :

- Kualitas aparatur, menurut Ruky dalam Samsudin dkk. (2014:2) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.
- Kompetensi administrator, Menurut Rivai dalam Samsudin dkk. (2014:3) menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.
- Sarana prasarana, merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Menurut Kaho dalam Samsudin dkk. (2014:3) bahwa faktor sarana dan prasarana diartikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak aktivitas pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami secara mendalam proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, termasuk efektivitas dan tantangan yang dihadapi.

Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, proses, serta pemahaman yang mendalam,

bukan pada pengukuran angka. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini yang ingin menggali lebih dalam bagaimana implementasi BPNT dijalankan dan apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas maupun tantangan dalam pelaksanaannya.

Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini terfokus pada satu lokasi tertentu dengan objek spesifik, yaitu implementasi BPNT di Kecamatan Ratu Samban, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara lebih rinci dan kontekstual. Yin (2018) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas. Metode ini relevan digunakan untuk penelitian implementasi kebijakan, karena mampu mengungkap secara detail interaksi antar aktor, prosedur, serta hambatan yang muncul dalam praktik di lapangan.

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai data jenuh. Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, dan pengorganisasian data mentah dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu implementasi efektivitas dan tantangan program bantuan pangan non tunai (BPNT). Data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian akan disisihkan sehingga analisis lebih terarah.

Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun gambar sehingga memudahkan pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Penyajian data ini membantu peneliti dalam melihat pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam informasi mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara mengecek kembali temuan-temuan dengan data di lapangan agar hasil penelitian tetap konsisten, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu studi kasus efektivitas dan tantangan. Adapun uraian

disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabnya. Maka secara sederhana dan pembahasan dalam penelitian ini di sajikan sebagai berikut :

Ketepatan Sasaran

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan program dalam mencapai sasaran. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes). Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian data, seperti masyarakat yang tidak layak tetapi terdaftar, dan sebaliknya.

Sistem pendataan dan verifikasi penerima BPNT di Kecamatan Ratu Samban sudah berjalan cukup baik, berjenjang, dan terkoordinasi antar instansi. DTKS menjadi basis utama, namun tetap disempurnakan dengan data lapangan dan partisipasi masyarakat. Pengawasan dan monitoring aktif dari Dinas Sosial, kecamatan, dan pendamping sosial membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Permasalahan utama yang masih dihadapi adalah ketidaktepatan sebagian data penerima serta

belum optimalnya pembaruan DTKS, yang menyebabkan adanya penerima tidak layak atau warga miskin yang belum terdata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi mekanisme ketepatan sasaran Program BPNT di Kecamatan Ratu Samban sudah cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan dalam validasi data, koordinasi lintas lembaga, dan sistem pengaduan masyarakat agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga miskin yang paling membutuhkan.

Kemudahan Akses

Kemudahan akses dalam implementasi program BPNT di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu mencakup tersedianya e-warung yang dekat dengan lokasi penerima manfaat, kemudahan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta pendampingan dari petugas sosial. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk keterbatasan jumlah e-warung, kendala teknis, dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur program.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Ibu Sri Harneti, S.Sos mengatakan bahwa :

“Secara umum, penerima manfaat BPNT dapat mengakses bantuan dengan cukup mudah. Proses penyaluran dilakukan melalui kartu elektronik (KKS) yang dapat digunakan di agen e-warung resmi. Pihak Dinas Sosial memastikan bahwa setiap KPM memiliki PIN dan buku panduan penggunaan KKS, serta mendapatkan pendampingan dari petugas sosial. Namun, pada beberapa kasus, masih ditemukan kendala teknis seperti gangguan jaringan atau mesin EDC di e-warung yang menyebabkan keterlambatan transaksi. Kendala seperti ini biasanya segera kami tindaklanjuti bekerja sama dengan pihak bank penyalur.”

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Staff Fungsional Dinas Sosial Bapak Budiman Sanjaya, S.Sos mengungkapkan bahwa :

“Dari sisi operasional, mekanisme akses dana BPNT sudah terdigitalisasi dan relatif mudah, karena penerima cukup datang ke e-warung membawa KKS dan KTP. Pendamping sosial biasanya membantu jika ada penerima yang kurang memahami cara transaksi. Hanya saja, ada beberapa penerima lansia atau yang tinggal jauh dari lokasi e-warung, sehingga perlu bantuan tambahan, misalnya melalui pendamping atau keluarga. Kami juga sedang berkoordinasi untuk menambah titik e-warung baru agar akses lebih merata.”

Ketepatan Waktu

Hal serupa diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu evaluasi dan monitoring program BPNT di Kecamatan Ratu Samban telah dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Kegiatan ini tidak hanya memastikan penyaluran berjalan sesuai jadwal, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki sistem pelayanan dan meningkatkan efektivitas program agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepuasan Penerima

Kepuasan penerima juga didukung oleh peran aktif pendamping sosial yang selalu hadir saat penyaluran, memantau jalannya transaksi, serta menindaklanjuti jika terjadi masalah seperti saldo belum masuk, gangguan jaringan, atau stok barang habis. Pendamping juga terbuka menerima masukan dari penerima, sehingga masyarakat merasa suara mereka didengar dan dihargai.

Sebagian kecil penerima menyampaikan beberapa keluhan minor, seperti keterlambatan penyaluran bantuan, gangguan jaringan pada mesin EDC, serta lokasi e-warung yang cukup jauh bagi penerima lanjut usia atau yang tidak memiliki kendaraan. Meskipun demikian, kendala tersebut tidak terlalu mempengaruhi kepuasan secara keseluruhan karena segera ditangani oleh pihak terkait melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan bank penyalur.

Para penerima manfaat menilai kualitas pelayanan program BPNT sangat baik dan memuaskan. Mereka mengapresiasi sikap ramah petugas, kemudahan transaksi non-tunai, dan pendampingan sosial yang aktif membantu. Kendala kecil seperti stok bahan pangan yang kadang kosong, antrian panjang, atau gangguan mesin EDC masih ditemukan, namun hal tersebut tidak terlalu memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Mayoritas penerima merasa program ini transparan, tertib, dan benar-benar membantu kebutuhan pangan rumah tangga.

Administratif

Secara administratif, pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu telah berjalan sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, aparat kecamatan, pendamping sosial, serta penerima manfaat, dapat disimpulkan bahwa aspek administratif dalam penyelenggaraan program ini sudah cukup tertata dan terkoordinasi dengan baik di setiap tingkatan pelaksana.

Aspek administratif dalam pelaksanaan program BPNT menunjukkan tingkat keteraturan dan transparansi yang baik. Administrasi yang rapi dan digitalisasi sistem penyaluran terbukti meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan distribusi, serta memperkuat akuntabilitas program. Namun demikian, penelitian juga mencatat perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data dan pelaporan, serta penambahan sarana teknologi di tingkat e-warong untuk menunjang sistem administrasi yang lebih cepat dan akurat.

Teknis

Secara teknis, pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Ratu Samban telah berjalan dengan sistematis dan mengikuti pedoman dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Program ini dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang memungkinkan penerima manfaat melakukan transaksi langsung di agen e-warong yang telah ditunjuk secara resmi. Pelaksanaan teknis program mencakup beberapa tahapan penting, yaitu: Pendataan dan Validasi Penerima Manfaat, Penyaluran Bantuan melalui Sistem Elektronik, Peran E-warong dan Pendamping Sosial, Monitoring dan Evaluasi Teknis, Sistem Pelaporan dan Penanganan Masalah Teknis

Dapat disimpulkan bahwa proses penarikan dana BPNT berjalan dengan baik, praktis, dan mudah dipahami oleh masyarakat penerima. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penarikan dilakukan di e-warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi. Prosesnya melibatkan penggesekan kartu di mesin Electronic Data Capture (EDC) yang kemudian secara otomatis mengurangi saldo bantuan dan digantikan dengan bahan pangan seperti beras, telur, atau minyak goreng.

Responden menilai sistem non-tunai ini lebih aman dan transparan karena tidak ada uang fisik yang berpindah tangan, serta setiap transaksi disertai dengan struk bukti penyaluran. Para pendamping sosial dan petugas e-warong juga berperan penting dalam membantu penerima yang belum paham teknis transaksi, terutama bagi lansia atau penerima yang memiliki keterbatasan. Kendala yang kadang muncul bersifat teknis, seperti gangguan jaringan EDC, antrean panjang, atau saldo bantuan yang belum masuk tepat waktu, namun hal ini tidak menghambat secara signifikan karena biasanya segera diatasi dengan bantuan petugas. Secara keseluruhan, penerima manfaat merasa proses penarikan dana BPNT sudah efektif, efisien, dan transparan, mendukung tujuan utama program dalam menyalurkan bantuan pangan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Sosial Budaya

Dari sisi sosial, masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Ratu Samban menunjukkan adanya rasa kebersamaan dan solidaritas tinggi. Banyak penerima saling membantu dalam memahami cara penggunaan KKS, terutama bagi warga lanjut usia atau yang kurang memahami teknologi. Pendamping sosial dan pengurus e-warong juga menjadi bagian dari jaringan sosial yang kuat, di mana hubungan mereka dengan masyarakat bersifat dekat dan penuh kepercayaan. Hal ini membantu memperlancar proses distribusi bantuan serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam menerima manfaat program.

Faktor sosial budaya memang menjadi salah satu tantangan penting dalam implementasi program BPNT. Hambatan yang muncul meliputi rendahnya literasi digital, ketergantungan terhadap bantuan langsung, resistensi terhadap perubahan sistem, serta perbedaan tingkat pemahaman antar kelompok masyarakat. Namun, melalui pendekatan edukatif, pendampingan berkelanjutan, dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tantangan ini secara bertahap dapat diatasi.

Berdasarkan pendapat para penerima manfaat, kesulitan dalam mengimplementasikan program BPNT karena faktor sosial budaya masih dirasakan oleh sebagian penerima, terutama yang berusia lanjut, berpendidikan rendah, atau belum terbiasa dengan teknologi digital. Faktor seperti rasa malu, ketakutan berbuat salah, serta kebiasaan lama dalam menerima bantuan secara langsung juga menjadi penghambat. Namun, dengan adanya pendampingan sosial, sosialisasi berulang, dan dukungan keluarga, sebagian besar penerima akhirnya mampu beradaptasi dan merasa program ini tetap memudahkan mereka.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk memaparkan temuan penelitian tentang implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Pembahasan ini akan memaparkan temuan penelitian tentang implementasi program BPNT, efektivitas program, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program BPNT.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik. Program ini telah membantu meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan di kecamatan tersebut. Petugas BPNT telah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada penerima manfaat untuk menggunakan kartu BPNT dengan benar.

Dalam proses implementasi program BPNT, petugas BPNT telah melakukan beberapa kegiatan, seperti pendaftaran penerima manfaat, distribusi kartu BPNT, dan pendampingan penggunaan kartu BPNT. Petugas BPNT juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program BPNT untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya Bantuan Pangan Non Tunai sebelumnya itu dilatar belakangi dengan sebutan bantuan beras sejahtera. Terjadinya pergantian nama ini dikarenakan faktor utamanya banyak masyarakat yang mengeluh terhadap program Rastra karena kebanyakan masyarakat hanya mendapatkan beras saja dan mereka membutuhkan juga sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergantian nama ini dilakukan pada bulan april 2018 sudah terdapat dalam peraturan menteri sosial. Dari data yang sudah ada diketahui bahwa seluruh kecamatan Ratu Samban menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin melalui penyaluran bantuan secara non-tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pelaksana program (Dinas Sosial, pihak kecamatan, dan pendamping sosial) serta penerima manfaat di Kecamatan Ratu Samban, dapat disimpulkan bahwa implementasi BPNT di wilayah ini secara umum telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan teknis dan sosial yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas program BPNT. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar penerima manfaat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, lansia tanpa penghasilan tetap, dan rumah tangga rentan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan verifikasi penerima sudah cukup baik.

Pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu secara berkala melakukan pembaharuan data dan verifikasi faktual untuk memastikan penerima masih memenuhi kriteria kelayakan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan data, seperti penerima ganda atau keluarga yang sudah tidak layak tetapi masih terdaftar karena belum adanya pembaruan data cepat di tingkat kelurahan. Kondisi ini menjadi tantangan administratif yang perlu diperbaiki agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

b. Kemudahan Akses

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa penerima manfaat di Kecamatan Ratu Samban relatif mudah mengakses dana BPNT melalui KKS dan e-warong resmi. Proses transaksi non-tunai ini dinilai lebih transparan dan mengurangi potensi penyimpangan. Petugas e-warong juga aktif membantu penerima, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan kartu elektronik.

Meskipun demikian, terdapat kendala pada penerima lansia, difabel, dan warga yang tinggal jauh dari e-warong, yang menyebabkan mereka memerlukan bantuan keluarga atau pendamping sosial untuk mengambil bantuan. Selain itu, jumlah e-warong yang terbatas juga menjadi hambatan akses di beberapa kelurahan. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan titik e-warong agar jangkauan layanan semakin merata dan tidak menimbulkan antrian panjang.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu penyaluran menjadi faktor penting dalam mengukur keberhasilan implementasi program BPNT. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden

menyatakan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Proses transfer dana ke rekening penerima juga relatif lancar, berkat koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dan bank penyalur (Himbara).

Namun, terkadang masih terjadi keterlambatan transfer dana akibat kendala teknis seperti gangguan sistem perbankan, keterlambatan sinkronisasi data, atau perbedaan jadwal antar bank. Meski bersifat sementara, hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan penerima manfaat. Dinas Sosial berupaya mengatasi hal tersebut dengan memberikan pengumuman resmi melalui pendamping sosial dan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan keterlambatan tidak berlarut.

d. Kepuasan Penerima

Secara umum, penerima manfaat menyatakan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap program BPNT. Mereka merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng. Sistem non-tunai dianggap lebih aman dan efisien karena bantuan diterima langsung dalam bentuk saldo yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan seperti stok barang di e-warong yang kadang terbatas, kualitas bahan pangan yang tidak seragam, serta kurangnya variasi pilihan barang. Beberapa penerima juga berharap agar nilai bantuan dapat ditingkatkan mengikuti kenaikan harga bahan pokok. Namun secara keseluruhan, program ini dipandang berhasil meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

e. Aspek Administratif

Dari sisi administratif, pelaksanaan BPNT di Kecamatan Ratu Samban sudah mengikuti mekanisme formal dari Kementerian Sosial. Seluruh data penerima tersimpan dalam sistem DTKS dan terintegrasi dengan bank penyalur. Proses administrasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial Kota, pihak kecamatan, kelurahan, hingga pendamping sosial yang bertugas melakukan verifikasi dan pelaporan bulanan.

Namun, tantangan yang sering muncul adalah keterlambatan input data, perubahan status sosial ekonomi penerima, serta perbedaan data antara DTKS dan data lapangan. Selain itu, beban administrasi yang cukup tinggi bagi petugas pendamping membuat proses pelaporan memerlukan waktu lebih lama. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial telah berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kemampuan aparatur melalui pelatihan administrasi digital.

f. Aspek Teknis

Secara teknis, mekanisme penyaluran bantuan melalui sistem elektronik (KKS dan EDC) telah meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan program. Penerima cukup membawa KKS dan KTP ke e-warong untuk melakukan transaksi. Sistem ini mengurangi risiko kebocoran dana serta memastikan bantuan diterima langsung oleh yang berhak.

Namun, kendala teknis masih sering terjadi seperti gangguan jaringan internet, kerusakan mesin EDC, dan keterbatasan kapasitas e-warong. Ketika penyaluran dilakukan serentak, terjadi penumpukan antrean yang menghambat pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Dinas Sosial bekerja sama dengan bank penyalur dan penyedia e-warong guna melakukan pemeliharaan perangkat dan penambahan kapasitas layanan secara berkala.

g. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi BPNT di Kecamatan Ratu Samban. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian penerima manfaat masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem digitalisasi, terutama kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Mereka memerlukan bimbingan dan pendampingan lebih intensif dari petugas sosial maupun keluarga.

Selain itu, terdapat pula dinamika sosial berupa kecemburuan antarwarga yang merasa tidak mendapatkan bantuan, meskipun kondisinya dianggap layak. Faktor ini kadang menimbulkan konflik sosial ringan di tingkat RT atau kelurahan. Untuk mengatasinya, pemerintah kecamatan dan pendamping sosial berupaya melakukan sosialisasi terbuka mengenai kriteria penerima manfaat serta mengedukasi masyarakat tentang tujuan program agar tidak menimbulkan salah persepsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi Program BPNT di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ratu Samban telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan pedoman dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Proses implementasi dilakukan melalui tahapan-tahapan sistematis, meliputi pendataan calon penerima manfaat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), verifikasi dan validasi data oleh pendamping sosial dan pemerintah daerah, serta penyaluran bantuan melalui mekanisme non-tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di agen e-warong yang telah ditunjuk.

Program ini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dengan membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok setiap bulannya. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang terlibat, seperti Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, kelurahan, pendamping sosial, serta pihak bank penyalur, berjalan cukup efektif.

2. Efektivitas dan Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Program BPNT di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu

Efektivitas pelaksanaan program BPNT dianalisis melalui tujuh indikator utama, yaitu ketepatan sasaran, kemudahan akses, ketepatan waktu, kepuasan penerima, administratif, teknis, dan sosial budaya.

3. Ketepatan Sasaran

Secara umum, penerima manfaat BPNT telah sesuai dengan kriteria keluarga miskin berdasarkan DTKS. Proses verifikasi dan validasi oleh pendamping sosial dan pemerintah kelurahan telah membantu memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil penerima yang dianggap belum tepat sasaran akibat data yang belum sepenuhnya mutakhir.

4. Kemudahan Akses

Sebagian besar penerima manfaat menyatakan kemudahan dalam mengakses bantuan melalui e-warong menggunakan KKS. Namun, bagi penerima lanjut usia atau yang tinggal jauh dari lokasi e-warong, akses masih menjadi kendala yang membutuhkan dukungan pendamping sosial dan keluarga.

5. Ketepatan Waktu

Penyaluran bantuan umumnya dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan setiap bulannya. Hambatan yang muncul biasanya disebabkan oleh gangguan jaringan atau keterlambatan saldo masuk dari pihak bank penyalur, tetapi tidak bersifat berkepanjangan.

6. Kepuasan Penerima

Mayoritas penerima manfaat merasa puas dengan sistem non-tunai yang dinilai lebih transparan, efisien, dan aman dibandingkan sistem bantuan tunai sebelumnya. Pendamping sosial juga dinilai berperan aktif dalam memberikan bantuan dan sosialisasi di lapangan.

7. Administratif

Dalam aspek administrasi, pengelolaan data penerima, pelaporan, dan koordinasi antarinstansi sudah berjalan baik. Namun, tantangan masih terdapat pada sinkronisasi data antara pusat dan daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menangani administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan.

8. Teknis

Secara teknis, sistem elektronik melalui KKS dan EDC telah mempermudah transaksi, tetapi kendala teknis seperti gangguan jaringan, rusaknya mesin EDC, atau keterlambatan pasokan bahan pangan di e-warong masih terjadi. Meskipun demikian, pihak Dinas Sosial dan pendamping segera melakukan penanganan agar tidak menghambat penyaluran bantuan.

9. Sosial Budaya

Faktor sosial budaya juga mempengaruhi efektivitas implementasi program. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami sistem digital, adanya kesenjangan sosial antarwarga terkait siapa yang berhak menerima bantuan, serta nilai gotong royong yang menurun akibat kecemburuan sosial. Oleh karena itu, edukasi dan komunikasi publik perlu terus ditingkatkan agar penerimaan program lebih merata dan diterima secara positif oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan BPNT di Kecamatan Ratu Samban sudah efektif dalam membantu masyarakat miskin mengakses pangan secara layak, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis, administratif, dan sosial budaya yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan frekuensi dan kualitas verifikasi serta validasi data penerima agar penyaluran benar-benar tepat sasaran.

- b. Melakukan pelatihan dan pembinaan rutin kepada pendamping sosial terkait penggunaan aplikasi digital dan pengelolaan administrasi agar pelaporan lebih cepat dan akurat.
- c. Menjalin koordinasi lebih intensif dengan pihak bank penyalur untuk mengantisipasi gangguan sistem atau keterlambatan transfer bantuan.
- d. Menambah jumlah dan memperluas jangkauan **e-warong**, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah yang jauh dari pusat kota.
- a. Memfasilitasi sosialisasi dan edukasi digital bagi masyarakat, khususnya kelompok lansia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, agar mereka lebih memahami mekanisme program BPNT.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes novelia mercuri., titiek Kartika., yorry hardayani., (2021). Implementasi program bantuan pangan non tunai di kelurahan kampung bali kota Bengkulu. *Jurnal governance dan administrasi publik*.
- Ayu Ariska, 2023. *Implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di kelurahan duampanua kecamatan baranti kabupaten sidrap*. Institut Agama Islam Negeri Pare-pare.
- Devi Sasmita, (2024). *Evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di kelurahan duri barat kecamatan Mandau kabupaten bengkalis (skripsi)*. Universitas Lancang Kuning.
- Dita rizky anindy putri, (2021). *Efektivitas pengelolaan bantuan pangan non tunai (BPNT) oleh dinas sosial dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat kota bima (studi kasus kecamatan raba)*. Universitas Muhamadiyah Mataram.
- Gracenda febina Br purba., dicky m.c.sinulingga., josua togatorop., lokot muda harahap., (2025). Peran program bantuan sosial dalam pengetasan kemiskinan : evaluasi dari berbagai penelitian. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* (109).
- Mayang puspita sari. 2024. *Implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai didesa balai makam kecamatan bahtin solapan kabupaten bengkalis provinsi riau*. Universitas medan area.
- Nur indah sari. 2022. *Efektivitas program bantuan pangan non tunai bpnt desa tanrara kecamatan bontonompo Selatan kabupaten gowa*. Universitas negeri makassar.
- Rizky Ananda putra., dr.nunuk dwi retnandari,M.Si., 2019. Tesis. *Efektivitas implementasi program bantuan pangan non tunai bpnt untuk Masyarakat miskin dikecamatan patuk kabupaten gunung kidul*. Universitas Gadjah mada.
- Rupertus Suwandi Ogot., Sapto Pramono., Widyawati.,(2024) Efektivitas pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT) di kelurahan watu kecmatan langke rembong kabupaten maggarai. *Jurnal administrasi publik*, 180.
- Savira Aulia. 2019. *Efektivitas program penyaluran bantuan pangan non tunai bpnt sebagai pengganti rastra di kecamatan sukun kota malang*. Universitas Brawijaya.
- Wildayanti. 2023. *Implementasi program bantuan pangan non tunai bpnt desa bontosunggu kecamatan bajeng kabupaten gowa*. Universitas hasanuddin.
- Zulbaidah, 2021. *Implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) (skripsi)*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry banda aceh.
- Happy Maulia Dewi,2023. *Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bantuanpangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Tratemulyo (skripsi)*. UNIVERSITAS SEMARANG